



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

LKPJ

TAHUN 2020

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

JL. MR. MOHD HASAN. NO. 102. KEC. LUENG BATA BANDA ACEH. 23352



Dinas Registrasi Kependudukan Aceh



@DRKACEH



drka.aceh



drka.acehprov.go.id



DRKA ACEH



0651- 7315005



drka@acehprov.go.id

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam hal menjalankan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 116 Tahun 2016, maka Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai urusan sebagai berikut:

DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH:

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam hal menjalankan program dan kegiatan tahun 2020 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai anggaran dan realisasi keuangan untuk mencapai program dan kegiatan yang dijalankan, untuk tahun 2020 Alokasi dan Realiasi Keuangan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Alokasi dan realisasi keuangan program dan kegiatan
Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2020	ANGGARAN SETELAH REFOKUCING TAHUN 2020	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2020	%
TOTAL ANGGARAN		22.496.398.508	17.998.926.144	16.020.132.586	89,01
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.528.068.895	7.528.068.895	5.981.605.513	79,46
II	BELANJA LANGSUNG	14.968.329.613	10.470.857.249	10.038.527.073	95,87
III	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.342.480.529	2.563.876.573	2.506.074.807	97,75
01:01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.303.000	75.407.000	71.514.200	94,84
01:02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	361.876.100	330.886.400	299.789.436	90,60
01:08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	202.391.400	232.743.109	232.427.000	99,86
01:10	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	116.008.484	86.005.051	85.802.090	99,76
01:11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.966.660	52.966.464	52.230.300	98,61
01:13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.214.999	129.712.453	129.322.454	99,70
01:18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	577.779.000	390.375.000	390.156.090	99,94
01:20	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	396.349.954	170.400.879	170.308.325	99,95
01:22	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.307.590.932	1.095.380.217	1.074.524.912	98,10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.381.305.896	3.140.681.931	3.011.506.827	95,89
02:03	Pembangunan Gedung Kantor	1.097.935.044	1.124.372.938	1.094.968.587	97,38
02:05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional	1.826.200.000	1.658.200.000	1.619.369.183	97,66
02:22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000	68.835.008	68.828.100	99,99
02:24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	250.220.433	219.222.862	163.310.957	74,50
02:30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	86.950.419	70.051.123	65.030.000	92,83
02:33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	20.000.000	-	-	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		60.489.660	60.489.660	58.320.000	96,41
03:02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60.489.660	60.489.660	58.320.000	96,41
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			4.500.000	1.349.200	29,98
05:01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	251.450.000	4.500.000	1.349.200	29,98

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		143.228.203	143.228.203	142.797.500	99,70
06.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	92.953.486	92.953.486	92.951.500	100,00
06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	50.274.717	50.274.717	49.846.000	99,15
IV	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	8.040.825.325	4.558.080.882	4.318.478.557	94,74
15:01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	131.321.477	-	-	-
15:02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	353.325.311	57.600.000	57.600.000	100,00
15:03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	181.952.296	58.952.061	58.778.000	99,70
15:05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	503.840.935	281.202.954	274.069.219	97,46
15:06	Pengelolaan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	614.557.449	377.613.282	353.272.519	93,55
15:08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	390.833.644	-	-	-
15:09	Pengembangan Data Base Kependudukan	252.800.312	222.638.045	213.315.849	95,81
15:10	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	107.858.643	-	-	-
15:11	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	264.452.703	-	-	-
15:12	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	279.434.062	132.819.066	128.839.972	97,00
15:13	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	433.105.282	-	-	-
15:14	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	352.258.475	-	-	-
15:15	Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.758.773	155.477.770	155.377.300	99,94
15:19	Pemanfaatan Data dan informasi Kependudukan	441.807.374	259.657.885	245.485.000	94,54
15:20	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Migas Kab/Kota)	2.850.000.000	2.850.000.000	2.669.620.879	93,67
15:21	Kemitraan Layanan Administrasi Kependudukan	559.518.589	162.119.819	162.119.819	100,00

B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berada pada Program Penataan Administrasi Kependudukan didalam Program tersebut ada 16 sub kegiatan/ rekening dalam menyukseskan Program Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu.

Pada tahun 2020 melalui rekening Pembangunan dan Pengoperasin SIAK secara terpadu, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mengalokasikan dana sebesar Rp. 131.321.477,-. Kegiatan Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu dibuat dalam 2 bentuk kegiatan. Yaitu Updating Data secara terpadu yang dilakukan 2 tahap, kegiatan ini ditujukan kepada Petugas Administrator Data Base (ADB) kabupaten/Kota. Namun pada bulan 3 Maret 2020 kegiatan tersebut gagal dilaksanakan karena kasus pandemi covid-19, sehingga data yang sudah di alokasikan dilakukan refocussing untuk kebutuhan penanganan covid-19 di Aceh.

2. Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Tahun 2020.

Untuk pelatihan tenaga pengelola SIAK Dinas Registrasi Kependudukan Aceh tahun 2020 mengalokasikan dana sebesar Rp. 353.325.311,- adapun kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Bimbingan Teknis untuk Tenaga Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terhadap Tenaga Teknis Administrator Database (ADB) di 23 Kabupaten/Kota, hal tersebut gagal dilaksanakan dikarenakan Pemula Se-Aceh, rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan April dan Juni tahun 2020 dibagi menjadi 2 Tahap pelaksanaan, kasus Pandemi Covid-19 gagal dilaksanakan, sehingga data yang sudah di anggarkan dikembalikan ke Kas Daerah untuk penanganan Covid-19 di Aceh. Sisa Anggaran sebesar Rp. 57.600.000,- untuk pembayaran Honorarium tenaga kontrak.

3. **Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan).**
 Untuk kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan dana tersedia tahun ini mencapai Rp. 181.952.296,- dengan rincian kegiatan untuk Pembersihan Dan Pemeliharaan Data Non Aktif, Anomali Dan Ganda Semester II 2019 dan Pembersihan Dan Pemeliharaan Data Non Aktif, Anomali Dan Ganda Semester I 2020. Rencana awal kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2020, dan untuk tahap Kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2020, kegiatan tersebut tidak berhasil dilaksanakan dikarenakan situasi Pandemi Covid-19, sehingga sisa Anggaran sebesar Rp. 58.952.061,- untuk membayar honorarium tenaga kontrak pada Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
4. **Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.**
 Pada rekening ini Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mengalokasikan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 503.840.935,- dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut: Rapat Koordinasi Dukcapil 23 Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Dukcapil 23 Kabupaten/Kota, Lokakarya Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Rapat Kerja Pencatatan Sipil. Rapat Koordinasi dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020 sebelum kasus Covid-19, peserta rapat koordinasi Dukcapil terdiri dari Kepala Disdukcapil 23 Kabupaten/Kota, Sekretaris Dukcapil 23 Kabupaten/Kota dengan tujuan melakukan singronisasi kebijakan yang dilakukan di daerah dan evaluasi tentang hambatan dan tantangan ditahun sebelumnya. Untuk kegiatan Rapat Kerja Pencatatan Sipil dilaksanakan pada bulan Februari 2020 dimana peserta yang hadir Kabid Pencatatan Sipil 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk kegiatan Lokakarya gagal dilaksanakan. Pada rekening tersebut setelah melakukan Refocussing dari total dana awal sebesar Rp. 503.840.935,- menjadi Rp. 281.202.954,- sehingga dana yang terserap pada rekening Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan sebesar Rp. 274.069.219,- sebesar 97% dari sisa dana.
5. **Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.**
 Sebelum Kasus Pandemi Covid-19 pada rekening ini memiliki dana sebesar Rp. 614.557.449,- kemudian di lakukan refocussing menjadi Rp. 377.613.282,-. Adapun kegiatan yang pada rekening tersebut antara lain: Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Laporan Rekapitulasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Aceh yang dikeluarkan setiap Semester. Pada tahun 2020 kegiatan tersebut tetap dilaksanakan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, dikarenakan Buku Profil merupakan Amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang wajib dilaksanakan di tingkat provinsi. Buku profil yang dikeluarkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan berisi tentang Data Kependudukan Skala Provinsi dimana data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dan rencana baik digunakan untuk perencanaan pembangunan dan perencanaan penganggaran di Pemerintah Aceh. Dana yang terserap akhir tahun sebesar Rp. 353.272.519,- atau sebesar 93,55%.
6. **Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan.**
 Kegiatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 390.833.644,-. Adapun kegiatan antara yang direncanakan pada rekening tersebut, antara lain: Implementasi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA di Kabupaten/Kota dan Layanan Rekam Cetak KTP Elektronik. Rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober Tahun 2020, hal tersebut gagal dilaksanakan karena kasus Covid-19 dan semua anggaran direkening tersebut dilakukan Refocussing.
7. **Pengembangan Database Kependudukan.**
 Untuk kegiatan tersebut pada tahun 2020 anggaran sebesar Rp. 252.800.312,- namun terjadi pengurangan menjadi Rp. 222.638.045,- kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Virtual Meeting menggunakan Zoom Meeting, peserta yang tersebut berasal dari Disdukcapil 23 Kabupaten/Kota yang mewakili masing-masing bidang, tujuan dari pada kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan update masing-masing kabupaten/kota terhadap data base yang dikelola oleh masing-masing Kabupaten/kota serta kendala yang dihadapi selama Covid-19, pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020. Adapun dana yang terserap sebesar Rp. 213.315.849,- atau 95,81% dari total anggaran yang ada.
8. **Penyusunan Kebijakan Kependudukan.**
 Penyusunan Kebijakan Kependudukan tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 107.858.643,- dengan kegiatan berupa: Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosudure Pelayanan Adminduk (Front Office), rencana kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada bulan Juli dengan jumlah peserta 46

orang dari Disdukcapil Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut gagal dilaksanakan sehingga anggaran dilakukan Refocussing semuanya.

9. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil.

Jumlah anggaran untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil ditahun 2020 sebesar Rp. 264.452.703,-. Kegiatan yang direncanakan bimbingan teknis Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan, serta Bimbingan Teknis penataan arsip Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten/kota, Kegiatan tersebut rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan Oktober sehingga gagal dilaksanakan.

10. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan.

Untuk kegiatan sosialisasi sendiri tahun 2020 dialokasikan dana sebesar Rp. 279.434.062,- Kegiatan Sosialisasi yang akan dilakukan berupa: Penyebaran Informasi kebijakan kependudukan kab/kota Se-Aceh, Sosialisasi Kebijakan Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) pada 2 wilayah, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Lintas Instansi, Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Sipil, Baliho Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan. Dari 4 Kegiatan yang direncanakan hanya 1 yang berhasil dilaksanakan, yaitu kegiatan sosialisasi Pencatatan sipil. Dana yang terserap pada rekening tersebut sebesar Rp.132.819.066,- atau sebesar 97,00% sisanya dilakukan refocussing.

11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan.

Anggaran tahun 2020 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan Rp. 433.105.282,-. Awalnya kegiatan direkening tersebut antara lain: FGD Kerjasama Lintas Sektor Tentang Inovasi Layanan Adminduk Tingkat Kab/Kota, Kajian Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Kab/Kota, Workshop Kerjasama Pelayanan Adminduk Inklusif Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, Benchmarking untuk Peningkatan Inovasi Kapasitas SDM dan Kelembagaan DRKA. Semua kegiatan gagal dilaksanakan dan dana tersebut dilakukan Refocussing untuk Penanganan Covid-19.

12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi di 23 Kabupaten Kab/Kota. Hasil yang diharapkan adalah terkumpulnya data-data terkait kependudukan, permasalahan dan solusinya yang dibukukan dalam satu laporan dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Pada tahun 2020 untuk kegiatan Monev dan Pelaporan di alokasikan dana sebesar Rp. 352.258.475,- semua dana tersebut di dilakukan refocussing sehingga Kegiatan Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Disdukcapil tidak dilaksanakan ditahun 2020.

13. Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 323758773,- dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut: Rapat Tim Mapping Penduduk Rentan sebanyak 4 kali dan Rapat Evaluasi Penataan Laporan Reguler Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah dilakukan Refocussing, maka dana yang tersisa pada rekening tersebut sebesar Rp. 155.477.770,- untuk kegiatan Rapat Tim Mapping Penduduk Rentan yang awalnya dilaksanakan sebanyak 4 kali tinggal 2 kali. Serapan dana pada rekening tersebut sebesar Rp. 155.377.300,- atau 99,94%.

14. Pemanfaatan Data dan informasi Kependudukan

Jumlah Anggaran untuk Kegiatan tersebut sebesar Rp. 441.807.374,- setelah dilakukan Refocussing, maka dana yang tersisa pada rekening tersebut sebesar Rp. 259.657.885,- Kegiatan ini dilaksana antara lain: Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan, Fokus Group Diskusi Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Kabupaten/Kota, Workshop Kerjasama Pelayanan Adminduk, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama serta Rapat Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan. Pada Tahun 2020 Jumlah PSK yang berhasil dilakukan kerjasama sebanyak 4 PKS antara lain dengan Badan Kepengawaian Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Diskominsa Aceh dan Disnasker Mobduk. Dana yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 245.485.000,- atau sebesar 94, 54% dari sisa anggaran.

15. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan (Migas Kab/Kota)

Tahun 2020, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mendapat mandat mengelola Dana Migas Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.850.000.000,- untuk kegiatan: Pembangunan Gedung Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Aceh Singkil. Rehabilitasi Gedung Pelayanan Disdukcapil Kota Sabang dan Mobil Penjangkauan Pelayanan Disdukcapil Aceh Jaya. Kegiatan tersebut langsung dilaksanakan di Aceh Singkil, Kota Sabang dan Aceh Jaya. Adapun dana yang terserap sebesar Rp. 2.669.620.879,- atau sebesar 93,67% dari total anggaran.

16. Kemitraan Layanan Administrasi Kependudukan

Pada rekening ini dana yang dialokasikan sebesar Rp. 559.518.589,- untuk kegiatan: Pelatihan Petugas Registrasi Gampong. Workshop Petugas Registrasi Gampong, setelah dilakukan refocussing, maka sisa dana pada rekening tersebut sebesar Rp. 162.119.819,- hanya satu kegiatan saja yang dilaksanakan, yaitu Pelatihan Petugas Registrasi Gampong di Aceh Utara, kegiatan Pelatihan Petugas Registrasi Gampong merupakan kegiatan Inovasi yang dilaksanakan di Dinas Registrasi Kependudukan Aceh ditahun 2020 dan merupakan program lanjutan tahun 2019. Serapan anggaran pada rekening tersebut sebesar Rp. 162.119.819,- atau 100% dari sisa anggaran.

C. CAPAIAN KINERJA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH TAHUN 2020

Dari semua kegiatan yang dilaksanakan diatas merupakan upaya untuk mendukung cakupan kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh mempunyai indikator atau tolak ukur sebagai mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1.2
Capaian Kinerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET (%)	REALISASI (%)	REALISASI FISIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Pengelolaan Database dan Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Penduduk ber-KTP El Per Satuan Penduduk	64,25	94,35	3.585.347 Wajib KTP dari 3.585.347 yang Memiliki KTP El	
		Rasio bayi Berakte Kelahiran 0-5 Tahun	87,00	87,49	509.999 memiliki Akta Kelahiran dari Jumlah 582.893 bayi Usia 0-5 Tahun	
		Rasio Pasangan Berakta Nikah	34,00	45,21	1.033.668 yang berakte Nikah dari total 2.286.613 Pasangan yang menikah	
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	95,00	99,49	3.382.639 memiliki KTP dari 3.400.035 wajib KTP El	
		Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	86,00	87,03	1.623.818,00 memiliki Akta Lahir dari jumlah 1.865.796 bayi 0-18 Tahun	
		Presentase SKPA yang memanfaatkan data kependuduka	36 SKPA	26 SKPA	Sisa Kejar 10 SKPA dari 36 SKPA	

Catatan : Jumlah penduduk Aceh Tahun 2020 adalah 5.311.320. jiwa
* Sumber : Kemendagri, Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2020 Provinsi Aceh

a. Penduduk ber-KTP El Per Satuan Penduduk

Untuk Rasio Penduduk ber KTP Elektronik persatuan penduduk di Aceh sudah mencapai 99,49% dari jumlah yang wajib KTP Elektronik, jika dilihat bedasarkan data konsolidasi bersih sudah mencapai 3.382.639 orang. Hal ini sudah mencapai dari target yang ditetapkan dalam RPJMA Pemerintah Aceh ditahun 2020 hanya 95,00%.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Aceh Tahun 2020 berdasarkan Jenis Kelamin di Aceh.

Tabel. 1.3
Kepemilikan KTP EI Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	NAMA WILAYAH	WAJIB KTP PER 31-12-2020			MEMILIKI KTP EI		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Aceh Selatan	84.913	86.541	171.454	76.480	79.824	156.304
2	Aceh Tenggara	74.388	76.373	150.761	64.082	67.532	131.614
3	Aceh Timur	134.817	137.530	272.347	127.011	130.779	257.790
4	Aceh Tengah	72.043	72.009	144.052	70.061	70.528	140.589
5	Aceh Barat	68.904	68.497	137.401	66.118	66.490	132.608
6	Aceh Besar	133.366	135.913	269.279	133.153	135.751	268.904
7	Pidie	152.860	159.772	312.632	133.645	144.718	278.363
8	Aceh Utara	188.818	199.145	387.963	182.547	193.300	375.847
9	Simeulue	32.382	31.376	63.758	29.635	29.160	58.795
10	Aceh Singkil	40.278	40.315	80.593	38.993	39.201	78.194
11	Bireuen	144.579	156.234	300.813	133.249	146.193	279.442
12	Abdya	54.297	54.155	108.452	48.853	50.358	99.211
13	Gayo Lues	33.441	33.689	67.130	30.517	30.838	61.355
14	Aceh Jaya	31.147	30.624	61.771	30.940	30.422	61.362
15	Nagan Raya	60.943	60.668	121.611	55.850	56.293	112.143
16	Aceh Tamiang	101.950	100.820	202.770	98.741	98.461	197.202
17	Bener Meriah	52.775	53.027	105.802	51.798	52.185	103.983
18	Pidie Jaya	55.366	57.786	113.152	48.898	52.848	101.746
19	Kota Banda Aceh	82.106	83.310	165.416	82.066	83.271	165.337
20	Kota Sabang	14.102	14.321	28.423	13.206	13.546	26.752
21	Kota LSM	63.673	66.468	130.141	61.091	64.429	125.520
22	Kota Langsa	66.784	66.971	133.755	55.891	57.894	113.785
23	Kota Subulussalam	27.909	27.962	55.871	27.881	27.912	55.793
T O T A L		1.771.841	1.813.506	3.585.347	1.660.706	1.721.933	3.382.639

b. Bayi Berakte Kelahiran 0-5 Tahun

Jika dilihat dari segi Rasio Bayi berakte kelahiran 0-5 tahun, masyarakat telah memahami tentang pentingnya akta kelahiran anak dari 0-5 tahun hal ini dapat dilihat dari realisasi akta kelahiran anak dari 0-5 tahun ditahun 2202 sudah mencapai 87,49% dari target 87.00%. jika dilihat berdasarkan data di aceh bayi berusia 0-5 tahun sudah mendapatkan sebanyak 509.999 akta dari total 582.893 bayi wajib memiliki Akta Kelahiran.

Berikut data bayi yang memiliki Akta Kelahiran dari 0-5 Tahun di Aceh berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020.

Tabel. 1.4
Bayi Berakter Kalahiran 0-5 Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	NAMA WILAYAH	BAYI UMUR (0-5) TAHUN	MILIKI AKTA KELAHIRAN			BLM MEMILIKI AKTA LAHIR		
			LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Aceh Selatan	21.870	9.589	9.073	18.662	1.696	1.512	3.208
2	Aceh Tenggara	23.546	9.059	8.549	17.608	3.102	2.836	5.938
3	Aceh Timur	52.823	20.382	19.194	39.576	6.902	6.345	13.247
4	Aceh Tengah	24.589	11.869	11.128	22.997	814	778	1.592
5	Aceh Barat	19.464	9.057	8.436	17.493	1.046	925	1.971
6	Aceh Besar	44.359	21.781	20.458	42.239	1.102	1.018	2.120
7	Pidie	42.974	21.665	20.244	41.909	562	503	1.065
8	Aceh Utara	70.992	28.597	26.929	55.526	7.997	7.469	15.466

9	Simeulue	9.415	4.106	3.699	7.805	856	754	1.610
10	Aceh Singkil	15.577	7.612	7.143	14.755	434	388	822
11	Bireuen	51.726	22.403	21.067	43.470	4.346	3.910	8.256
12	Abdya	15.308	7.540	7.161	14.701	332	275	607
13	Gayo Lues	12.006	4.526	4.206	8.732	1.704	1.570	3.274
14	Aceh Jaya	10.255	5.030	4.725	9.755	270	230	500
15	Nagan Raya	16.969	7.043	6.716	13.759	1.623	1.587	3.210
16	Aceh Tamiang	31.793	15.585	14.453	30.038	903	852	1.755
17	Bener Meriah	18.763	9.302	8.772	18.074	387	302	689
18	Pidie Jaya	16.756	7.892	7.269	15.161	832	763	1.595
19	Kota Banda Aceh	29.211	14.662	13.968	28.630	314	267	581
20	Kota Sabang	4.694	2.361	2.283	4.644	26	24	50
21	Kota LSM	19.759	8.805	8.457	17.262	1.325	1.172	2.497
22	Kota Langsa	17.602	8.542	7.925	16.467	594	541	1.135
23	Subulussalam	12.442	5.569	5.167	10.736	909	797	1.706
TOTAL		582.893	262.977	247.022	509.999	38.076	34.818	72.894

Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran ini karena aktifnya Pemerintah dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang konsen terhadap hal ini. Kerjasama seluruh dinas terkait, masyarakat dan lembaga swasta lainnya juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kepemilikan akta kelahiran ini. Kemudahan dalam pengurusan dan terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk akta kelahiran ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki akta kelahiran, seperti, jika ibu melahirkan dirumah sakit maka pada saat ibu pulang dari rumah sakit maka akta lahirannya telah selesai dan bisa dibawa pulang sekalian juga. Hadirnya Petugas Registrasi Gampong dibeberapa Kabupaten/Kota juga sangat membantu para orang tua yang memiliki bayi berusia 0-5 tahun dalam mendapatkan dokumen akta kelahiran.

c. Pasangan Berakta Nikah

Pada Tahun 2020, Pasangan yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki Akta Kelahiran telah mencapai dari target yang ditentukan pada tahun 2020, besaran target ditahun 2020 yaitu sebesar 34,00%, dari kerjakeras 23 Kabupaten/Kota Aceh tahun ini sudah mencapai 45,21% dari total 2.286.613 masyarakat aceh yang tercatat Menikah, hanya sebanyak 1.623.818 yang memiliki akta nikah atau nikah tercatat, sedangkan sebanyak 241.978 belum memiliki Akta Nikah atau Nikah Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 23 kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Akta Nikah atau Nikah tercatat di Aceh dapat dilihat pada Tabel dibawah ini berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel.1.5
Pasangan yang memiliki Akta Nikah/ Nikah Tercatat Berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2020

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN			MILIKI AKTA NIKAH	BLM MEMILIKI AKTA NIKAH	%
		LK	PR	JML			
1	Aceh Selatan	38.423	35.805	74.228	62.391,00	11.837	84,05
2	Aceh Tenggara	43.731	40.752	84.483	71.316,00	13.167	84,41
3	Aceh Timur	86.092	80.765	166.857	128.459,00	38.398	76,99
4	Aceh Tengah	40.563	38.222	78.785	74.472,00	4.313	94,53
5	Aceh Barat	33.333	31.259	64.592	58.682,00	5.910	90,85
6	Aceh Besar	70.297	66.171	136.468	124.366,00	12.102	91,13
7	Pidie	75.544	70.935	146.479	131.390,00	15.089	89,70
8	Aceh Utara	109.092	101.939	211.031	171.745,00	39.286	81,38
9	Simeulue	17.713	16.300	34.013	29.173,00	4.840	85,77
10	Aceh Singkil	26.837	25.459	52.296	47.342,00	4.954	90,53

11	Bireuen	80.222	74.938	155.160	136.192,00	18.968	87,78
12	Abdya	25.299	23.642	48.941	41.853,00	7.088	85,52
13	Gayo Lues	19.323	18.481	37.804	32.997,00	4.807	87,28
14	Aceh Jaya	16.232	15.673	31.905	29.611,00	2.294	92,81
15	Nagan Raya	28.756	27.265	56.021	49.849,00	6.172	88,98
16	Aceh Tamiang	55.021	51.896	106.917	99.461,00	7.456	93,03
17	Bener Meriah	30.630	28.839	59.469	55.803,00	3.666	93,84
18	Pidie Jaya	27.944	25.951	53.895	49.191,00	4.704	91,27
19	Kota Banda Aceh	44.432	42.405	86.837	82.640,00	4.197	95,17
20	Kota Sabang	7.934	7.420	15.354	14.987,00	367	97,61
21	Kota LSM	34.885	32.782	67.667	52.302,00	15.365	77,29
22	Kota Langsa	31.851	29.805	61.656	47.607,00	14.049	77,21
23	Kota Subulussalam	17.989	16.949	34.938	31.989,00	2.949	91,56
TOTAL		962.143	903.653	1.865.796	1.623.818,00	241.978	87,03

Banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai angka tersebut, salah satunya bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama dalam hal pemanfaatan Aplikasi SIMKAH, hal tersebut dilakukan upaya untuk melakukan penertiban dan pencatatan setiap Warga yang akan melakukan Nikah agar Kawin tercatat secara negara. Selain itu Dinas Registrasi Kependudukan, Disdukcapil Kab/Kota sudah bekerjasama dengan Dinas Syari’at Islam untuk memfasilitasi pelaksanaan Isbat Nikah dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akta nikah.

Pada tabel diatas kita juga bisa melihat bahwa kecilnya persentase masyarakat yang memiliki akta nikah di Aceh masih belum mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, banyak masyarakat konflik sampai saat ini belum sepenuhnya memiliki akta nikah yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah.

d. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kab/Kota se-Aceh saat ini terus melakukan pelayanan perekaman KTP Elektronik langsung turun ke gampong-gampong untuk pencapaian target yang telah ditentukan. Saat ini kepemilikan KTP-EI telah mencapai 99,49% dari target realisasi 95% di tahun 2020 sesuai dengan dengan target yang harus dicapai 99% di akhir kerja yang ditentukan didalam RPJMA.

Hal ini juga disebabkan karena pencetakan KTP Elektronik telah dapat dilakukan di daerah-daerah tidak mesti menunggu dari pusat. Melalui Gerakan Indonesia Sadar Adminduk #GISA merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Registrasi Kependudukan dalam hal mencapai target

Berikut Data Kepemilikan KTP Elektronik berdasarkan jenis Kelamin di Aceh Tahun 2020.

Tabel. 1.6
Kepemilikan KTP EI Berdasarkan Jenis Kelamin di Aceh Tahun 2020

NO	NAMA WILAYAH	KEPEMILIKAN KTP ELEKTRONIK DI ACEH			
		LK	PR	JML	%
1	Aceh Selatan	76.480	79.824	156.304	99,60
2	Aceh Tenggara	64.082	67.532	131.614	98,42
3	Aceh Timur	127.011	130.779	257.790	97,75
4	Aceh Tengah	70.061	70.528	140.589	99,77
5	Aceh Barat	66.118	66.490	132.608	99,89
6	Aceh Besar	133.153	135.751	268.904	99,86
7	Pidie	133.645	144.718	278.363	99,93

8	Aceh Utara	182.547	193.300	375.847	99,89
9	Simeulue	29.635	29.160	58.795	99,85
10	Aceh Singkil	38.993	39.201	78.194	99,95
11	Bireuen	133.249	146.193	279.442	98,68
12	Abdya	48.853	50.358	99.211	99,88
13	Gayo Lues	30.517	30.838	61.355	99,52
14	Aceh Jaya	30.940	30.422	61.362	99,98
15	Nagan Raya	55.850	56.293	112.143	99,63
16	Aceh Tamiang	98.741	98.461	197.202	99,70
17	Bener Meriah	51.798	52.185	103.983	99,84
18	Pidie Jaya	48.898	52.848	101.746	99,15
19	Kota Banda Aceh	82.066	83.271	165.337	99,95
20	Kota Sabang	13.206	13.546	26.752	99,86
21	Kota LSM	61.091	64.429	125.520	99,87
22	Kota Langsa	55.891	57.894	113.785	99,49
23	Kota Subulussalam	27.881	27.912	55.793	99,86
TOTAL		1.660.706	1.721.933	3.382.639	99,49

Jika dilihat berdasarkan pencapaian target Kepemilikan KTP elektronik di Aceh sudah mencapai 99, 49% dari 100% masyarakat Aceh harus memiliki KTP Elektronik, masih ada sekitar 0,51% Masyarakat Aceh belum memiliki KTP Elektronik/ memegang KTP Elektronik. Perekaman di daerah terpencil, tertinggal dan terluar juga menjadi salah satu program dan kegiatan yang ditargetkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan ditahun 2021 guna mengejar keteringgalan masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Ikut terlibat dalam kegiatan Bansos yang dilakukan oleh pemerintah Aceh setiap tahun juga upaya yang sangat efektif untuk membuka perekaman Dokumen Kependudukan di kegiatan tersebut, masyarakat langsung mendapatkan dokumen kependudukan.

e. Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun

Secara Nasional Pencapaian Target Akta Kelahiran 0-18 tahun juga menjadi salah satu isu yang di angkat dalam renstra nasional ditahun 2020-2024, Pemerintah Aceh melalui Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah berupaya kerja keras dalam hal penncapaian target. Tahun 2020 dari target 86% Aceh sudah mencapai 87,03% anak dari usia 0-18 mendapatkan akta kelahiran, atau sebanyak 1.623.818 orang anak aceh sudah memiliki akta kelahiran dari total 1.865.796 anak. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II tahun 2020, Anak Aceh yang berusia 0-18 Tahun belum mendapatkan akta kelahiran sebesar 241.978 Anak atau sebesar 12,97% yang masih belum memiliki akta kelahiran dari usia 0-18 Tahun.

Kepemilikan Akta Kelahiran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel. 1.7
Kepemilikikan Akta kelahiran 0-18 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin tahun 2020

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN			MILIKI AKTA LAHIR 0-18 THN
		LK	PR	JML	
1	Aceh Selatan	38.423	35.805	74.228	62.391,00
2	Aceh Tenggara	43.731	40.752	84.483	71.316,00
3	Aceh Timur	86.092	80.765	166.857	128.459,00
4	Aceh Tengah	40.563	38.222	78.785	74.472,00
5	Aceh Barat	33.333	31.259	64.592	58.682,00
6	Aceh Besar	70.297	66.171	136.468	124.366,00
7	Pidie	75.544	70.935	146.479	131.390,00
8	Aceh Utara	109.092	101.939	211.031	171.745,00
9	Simeulue	17.713	16.300	34.013	29.173,00
10	Aceh Singkil	26.837	25.459	52.296	47.342,00

11	Bireuen	80.222	74.938	155.160	136.192,00
12	Abdya	25.299	23.642	48.941	41.853,00
13	Gayo Lues	19.323	18.481	37.804	32.997,00
14	Aceh Jaya	16.232	15.673	31.905	29.611,00
15	Nagan Raya	28.756	27.265	56.021	49.849,00
16	Aceh Tamiang	55.021	51.896	106.917	99.461,00
17	Bener Meriah	30.630	28.839	59.469	55.803,00
18	Pidie Jaya	27.944	25.951	53.895	49.191,00
19	Kota Banda Aceh	44.432	42.405	86.837	82.640,00
20	Kota Sabang	7.934	7.420	15.354	14.987,00
21	Kota LSM	34.885	32.782	67.667	52.302,00
22	Kota Langsa	31.851	29.805	61.656	47.607,00
23	Kota Subulussalam	17.989	16.949	34.938	31.989,00
TOTAL		962.143	903.653	1.865.796	1.623.818,00

f. Perjanjian Kerjasama dengan SKPA selama 3 Tahun

Untuk Perjanjian kerjasama dengan SKPA di lingkungan pemerintah Aceh, dari tahun 2018 sampai dengan 2020 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah bekerjasama sama, antara lain dapat dilihat dibawah ini:

- 1. Tahun 2018**

Pada tahun 2018 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Dinas, antara lain sebagai berikut:

 1. Dinas Kesehatan Aceh (DINKES)
 2. Badan Reintegrasi Aceh (BRA)
 3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (DISKOINSA)
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (BPSDM)
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A)
 6. Sekretariat Baitul Mal Aceh
 7. Dinas Peternakan Aceh
 8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
- 2. Tahun 2019**

Untuk tahun 2019, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh juga telah melakukan kerjasama antara lain sebagai berikut:

 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
 2. Satuyan Polisi Pamong Praja dan Wilayahuh Hisbah Aceh
 3. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
 4. Rumah Sakit Ibu dan Anak
 5. Rumah Sakit Jiwa
 6. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (BAPPEDA)
 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
 9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 10. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
 11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh
- 3. Tahun 2020**

Pada Tahun 2020, yang rencana awal ditargetkan 7 Perjanjian kerjasama dengan SKPA, karena Covid-19, maka Perjanjian kerjasamaa yang berhasil dilakukan, antara lain sebagai berikut:

 1. Dinas Pangan Aceh
 2. Badan Kepegawaian Aceh (BKA)
 3. Dinas Syariat Islam Aceh
 4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Jika dilihat dari Perjanjian kerjasama yang sudah berhasil dilakukan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 25 Perjanjian, maka di akhir target kerja sampai dengan 2022 Dinas Registrasi Kependudukan Aceh memiliki target 36 SKPA dilingkungan pemerintah Aceh, maka sisa kerjasamanya 11 SKPA lagi, maka Perjanjian kerjasama Pemanfaatan Data kependudukan juga salah satu dari indikator kerja Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.

D. KEBIJAKAN STRATEGIS DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH

1. Strategi
- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua Kabupaten/Kota;

b. Penyediaan Database Kependudukan skala Provinsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan;

c. Meningkatkan pemanfaatan NIK, KTP-el dan data kependudukan oleh instansi/lembaga pengguna di tingkat provinsi.
2. Kebijakan
- Kebijakan yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Registrasi Kependudukan Aceh adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu.

b. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

c. Fasilitasi Dan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk.

d. Fasilitasi Dan Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil.

e. Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

f. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

g. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
- Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMA Pemerintah Aceh dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh pada tabel dibawah ini:
- Tabel. 1.8
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DRKA
- | Visi: Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani | | | |
|---|---|---|---|
| Misi 9: Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatnya kualitas kebijakan yang efektif, efisien dan berkelanjutan | Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip evidence based planning. | - Penyediaan database kependudukan skala provinsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik dan perencanaan pembangunan | - Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu. |
| | | - Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kot | - Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan. |
| | | - Meningkatkan pemanfaatan NIK, database | - Fasilitasi dan pembinaan administrasi pendaftaran penduduk. |
| | | | - Fasilitasi dan pembinaan administrasi pencatatan sipil. |
| | | | - Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan. |
- 11

		kependudukan dan KTP-el oleh instansi/lembaga pengguna di tingkat provinsi.	- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
--	--	---	---

E. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tabel. 1.9
Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi DPRA

NO	PERMASALAHAN	JAWABAN	KET
1	2	3	4
1	Penyusunan program/kegiatan harus mempertimbangkan kebutuhan real melalui mekanisme yang benar sehingga tidak terkesan asal jadi. Dalam hal menyusun LKPJ Gubernur supaya mempedomani terget RPJM dan mensandingikan realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM sehingga kinerja Gubernur dapat di evaluasi tingkat keberhasilan.	terjadi perubahan penyusunan kegiatan diakhir perencanaan.	
2	Program dan kegiatan masih ada anggaran yang tidak terealisasi bearti masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan atau penggunaan anggaran tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang saat di rencanakan	Terjadi perubahan rencana kegiatan sehingga tidak sesuai dengan anggaran yang di ajukan atau di usulkan.	
3	Pemerintah aceh harus memperhatikan standar pelayanan publik sebagaimana ketentuannya dalam pasal 21 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kualifikasi pelaksana, standar operasional prosudure, pengelolaan komplek desk, melaksanakan pelayanan yang nyaman, dan menyediakan akses bagi kelompok rentan dan melaksanakan pengelolaan informasi yang sesuia dengan aturan perundang-undangan serta melakukan pengelolaan arsip yang baik.	Saat ini sudah terbentuk PPID di lingkungan Dinas Registrasi Kependudukan Aceh untuk kebutuhan pelayanan publik yang membahagiakan	
4	Pemerintah aceh perlu melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan registrasi kependudukan dengan data data terbaru dan mempercepat akses pengurusan administrasi bagi masyarakat.	DRKA bekerjasama dengan Dukcapil Kab/Kota sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mempermudah akse masyarakat dalam mendapatkan dokumen adminduk, seperti kegiatan: #GISA, Rekam Cetak 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdalam dan ikut serta dalam kegiatan baksos Pemerintah Aceh	

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

a. Permasalahan :

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Adminduk masih relatif kurang;
2. Masyarakat masih menganggap kepengurusan Dokumen Adminduk masih berbelit belit sehingga masyarakat dalam proses kepengurusan Dokumen Adminduk masih menunda nunda.
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia di Kabupaten/Kota yang memahami Tupoksi Dukcapil sehingga berimbas terhadap pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana di kabupaten/kota masih perlu ditingkatkan terutama Kabupaten/Kota.
5. Tidak adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan yang menyebabkan beberapa kegiatan yang mengalami kesalahan dan kekeliruan tidak bisa dilaksanakan, sehingga mengakibatkan minimnya penyerapan anggaran.
6. Terbatasnya waktu yang diberikan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sehingga menyebabkan Dokumen Pelaksanaan kurang sempurna.
7. Kondisi Pandemi Covid-19, sehingga banyak kegiatan batal pelaksanaan;
8. Kegiatan kegiatan bersifat pelatihan dilaksanakan melalui zoom meeting;

b. Solusi :

1. Mensukseskan perencanaan Pelayanan Online di 23 Kabupaten/Kota
2. Melaksanakan Kegiatan Dukcapil Sapa Masyarakat selama Covid-19
3. Melakukan Pelayanan melalui Media Online
4. Cetak Kartu Keluarga dan Identitas lainnya sudah bisa dicetak secara mandiri atau di anjungan Dukcapil mandiri;
5. Mendorong terbentuknya petugas Registrasi Gampong, Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pencatatan Sipil;
6. Pengiriman Laporan satu pintu melalui Aplikasi Sidasi;
7. Memperkuat Tim Rentan di Kabupaten/Kota dalam hal menjangkau dan menyelesaikan Dokumen Adminduk terhadap penduduk Rentan;
8. Ikut serta Berpartisipasi pada kegiatan baksos yang di adakan oleh Pemerintah aceh
9. Mendorong SKPA untuk terus Melakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data
10. Menjalin dan Meningkatkan Kerjasama Dengan Dinas/Instansi Terkait
11. Dokumen Perencanaan sudah Fleksibel dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis E-Rencana.
12. Memperkuat regulasi dan kebijakan daerah tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di 23 Kabupaten/Kota di Aceh.

KEPALA DINAS REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH



Drs. TEUKU SYARBAINI, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681103 199011 1 001